



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 41 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2027.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
2. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
3. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.

4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara
5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
7. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RENCANA AKSI

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 2

Renaksi Penerapan SPM Daerah Tahun 2023-2027 merupakan dokumen perencanaan sebagai:

- a. pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target penerapan SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan pelayanan dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; dan
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 3

- (1) Dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
 - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (2) Rincian dokumen Renaksi Penerapan SPM Daerah Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 13 AGUSTUS 2024

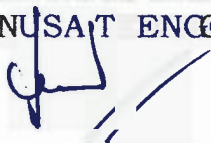
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE




Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 AGUSTUS 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 041

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 41 TAHUN 2024

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2024

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2027

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023-2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk mengatur urusannya sendiri sesuai karakteristik masing-masing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan otonomi daerah ini diharapkan dapat mewujudkan kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah.

Implementasi otonomi daerah sebagaimana di atas dilaksanakan oleh daerah berupa urusan konkuren (yang diserahkan ke daerah) dan urusan pemerintahan umum (kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan pula oleh kepala daerah) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan keadilan, pelaksanaan otonomi daerah juga diarahkan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masyarakat yang terangkum dalam urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana amanat pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta urusan sosial.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. Kondisi Umum Wilayah

1.3.1. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 609 pulau dengan luas wilayah 247.931,54 Km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 47.931,54 Km² dan wilayah lautan seluas 200.000 Km². Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 80-120 Lintang Selatan dan 1.180– 1.250 Bujur Timur.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu. Sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores.

Secara administratif wilayah NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kotadengan wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km² (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47km² (0,96 persen).

1.3.2. Topografi

Secara geomorfologis Provinsi NTT mempunyai bentuk wilayah berbukit-bukit dan bergunung-gunung, dengan dataran-dataran yang sempit yang umumnya memanjang sepanjang pantai dan di apit oleh dataran tinggi atau perbukitan.

Secara topografis 48,78 persen atau sekitar 2.309.747 ha luas wilayah NTT mempunyai lahan dengan rentang ketinggian 100– 500 m di atas permukaan laut (dpl). Sebagian kecil wilayah yaitu sebesar 3,65 persen memiliki ketinggian di atas 1.000 m. Dari sudut kemiringan lahanada 38,07 persen luas lahan yang mempunyai kemiringan 15–40 persen, sedangkan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen mencapai 35,46 persen dari keseluruhan luas wilayah. Dengan kondisi topografis tersebut, sistem produksi pertanian pada dataran rendah sangat terbatas baik untuk pertanian lahan basah maupun lahan kering.

1.3.3. Geologi

Wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk dalam kawasan Circum-Pacific sehingga daerah ini, terutama sepanjang Pulau Flores dan Pulau Timor, memiliki struktur tanah yang labil.

Pulau-pulau seperti Flores, Alor, Komodo, Solor, Lembata dan pulau-pulau sekitarnya terletak pada jalur vulkanik (*Ring of Fire*) dan dapat dikategorikan subur namun rawan bencana geologis. Di daerah ini juga terdapat kandungan sumber daya mineral dan sumber-sumber energi lainnya termasuk sumber energi panas bumi/bahan bakar minyak.

1.3.4. Demografi

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2022 Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdata per Semester II Tahun 2022 sebanyak 5.543.239 jiwa.

Jika dilihat dari penyebaran penduduk per Kabupaten/Kota terhadap total penduduk Nusa Tenggara Timur, maka distribusi penduduk terbesar berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 471.202 disusul Kota Kupang sebanyak 442.462 jiwa, Kabupaten Kupang sebanyak 385.622 jiwa, Kabupaten Manggarai sebanyak 331.299 jiwa dan Kabupaten Sikka sebanyak 330.476 jiwa. Sedangkan Kabupaten dengan persentase jumlah penduduk terendah Tahun 2022, yakni Kabupaten Sumba Tengah dengan jumlah penduduk sebanyak 89.245 jiwa, disusul Kabupaten Lembata sebanyak 142.348 jiwa dan Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 149.623 jiwa.

1.3.5. Analisis Kebencanaan

Provinsi NTT sering disebut sebagai 'supermarket bencana' dikarenakan sejarah kejadian bencana yang sangat beragam. Hal ini dapat terlihat jika ditilik berdasarkan Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB sampai dengan tahun 2021 di Provinsi NTT tercatat pernah mengalami sebanyak 829 kejadian bencana dengan dominasi kejadian bencana cuaca ekstrem yang mencapai 35% dan banjir sebanyak 31%. Sebanyak 660 kejadian bencana di NTT atau 80% merupakan bencana hidrometeorologis.

Dalam dokumen Peta Bahaya dan Kerentanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024 (BNPB, 2021) tercatat terdapat 14 potensi bencana di NTT yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, likuefaksi dan pandemic COVID-19.

Tujuh jenis bencana prioritas, yakni banjir, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, erupsi gunung api, gempa bumi dan tsunami, memiliki rata-rata tingkat ancaman sedang dan tinggi, keterpaparan penduduk tinggi, serta potensi kerugian tinggi. Sementara epidemi/wabah penyakit dan konflik sosial tergolong berisiko sedang karena tingkat ancaman yang sedang dan potensi kerugian sedang, walaupun indeks penduduk terpapar tinggi. Dua ancaman lain, gelombang ekstrim dan abrasi tergolong berisiko rendah karena tingkat ancaman dan indeks penduduk terpapar yang rendah, walaupun indeks kerugiannya tinggi.

Ancaman gempa bumi digolongkan tinggi di beberapa wilayah karena posisi NTT yang berada di zona subduksi lempeng bumi Euro Asia dan Australia serta adanya beberapa sesar aktif di sebelah utara Alor, sebelah utara Flores, bagian barat Sumba dan selatan Timor. Kerentanan terhadap gempa terutama disebabkan karena rentannya infrastruktur dan bangunan serta kepadatan penduduk. Oleh karenanya, kerentanan tinggi terhadap ancaman gempa terjadi di wilayah perkotaan, selain itu kerentanan gempa tergolong sedang.

Ancaman tsunami secara umum di NTT ada pada tingkat sedang sampai tinggi, terutama yang tingkat ancaman tinggi seperti daerah pesisir selatan Pulau Timor, Pulau Rote, Pulau Sumba, pesisir utara Pulau Flores, Kep. Alor dan Pulau Lembata. Walaupun data DIBI mencatat ada 5 kali tsunami di NTT (3 kali di Sikka dan 2 kali di Flores Timur), sumber lain juga mencatat kejadian tsunami di Sumba (1977) dan di Lembata (1979). Kerentanan terhadap tsunami rata-rata tergolong sedang sampai tinggi, terutama di wilayah pesisir dengan ancaman tsunami dan terdapat permukiman

Ancaman letusan gunung api tergolong tinggi di Nagekeo dan sedang di wilayah bergunung api lainnya yakni di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, Flores Timur, Lembata dan Alor. Catatan DIBI menunjukkan 11 kali letusan di wilayah – wilayah tersebut dalam 50 tahun terakhir. Kerentanan terhadap ancaman tersebut rata – rata tinggi, karena luasnya wilayah yang berpotensi terkena dampak di sekitar gunung berapi, yakni rata – rata 500 sampai dengan 3000 ha. Wilayah terkena dampak terluas ada di Nagekeo, yang menempatkan kabupaten ini sebagai paling rentan terhadap letusan gunung api.

Tanah longsor tergolong tinggi dan pernah terjadi di hampir semua kabupaten di NTT, terutama di wilayah – wilayah dengan tingkat kelerengan tinggi seperti di Flores, Alor dan beberapa daerah di Timor dan Sumba. Kerentanan terhadap longsor juga ada ditingkat sedang dan tinggi yang ditentukan oleh kepadatan bangunan dan infrastruktur, termasuk jalan dan potensi penduduk terpapar dampak, baik dampak fisik maupun sosial ekonomi.

Ancaman banjir termasuk tinggi dan sudah pernah terjadi di seluruh kabupaten di NTT, kecuali Sabu Raijua. Di Kabupaten Kupang dan Malaka, banjir merupakan bencana tahunan sedangkan di kabupaten lain seringkali terjadi banjir dengan longsor seperti di Ende, Flores Timur dan Manggarai. Tingkat kerentanan wilayah – wilayah di NTT terhadap banjir rata – rata sedang sampai tinggi, yang meliputi 10 kabupaten/kota. Kerentanan rendah hanya terdapat di Kabupaten Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah.

Ancaman kekeringan adalah ancaman dengan tingkat tinggi di NTT dan seringkali memicu terjadinya rawan pangan dan menurunnya debit air baku sebesar 50%. Rata – rata semua kabupaten di NTT memiliki kerentanan tinggi terhadap kekeringan. Hal ini terutama disebabkan karena kecenderungan rendahnya curah hujan dan ketergantungan terhadap hujan untuk produksi pangan.

Ancaman gelombang ekstrem dan abrasi tergolong rendah di banyak wilayah di NTT, dan tinggi di wilayah – wilayah pesisir pulau – pulau kecil. Tingkat kerentanan di beberapa wilayah di sepanjang NTT berpotensi tinggi dan mengancam pesisir pulau – pulau kecil. Kerentanan terhadap gelombang ekstrim juga terjadi di wilayah pesisir, dan secara umum tergolong sedang.

Ancaman bencana epidemi/wabah penyakit di NTT masih didominasi oleh masalah malaria dan DBD (demam berdarah dengue) yang terjadi di semua kabupaten/kota, walaupun tingkat ancamannya rata-rata rendah, kecuali di Kab. Sumba Barat, Lembata, Ende dan Kota Kupang. Walaupun ancaman tergolong rendah, tetapi tingkat kerentanan terhadap

di hampir seluruh wilayah di NTT. Sehingga secara keseluruhan, risiko wabah penyakit terindeks sedang.

Ancaman bencana kegagalan teknologi yang terjadi di NTT terutama adalah kebakaran hutan/lahan yang dikategorikan tinggi, terutama kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di seluruh wilayah di NTT. Tingkat kerentanan terhadap kebakaran hutan di sebagian besar wilayah adalah sedang, kecuali di Flores Timur, Sumba Timur, Sumba Barat, Kabupaten Kupang dan Sikka yang tinggi.

Ancaman konflik sosial di NTT tergolong berpotensi sedang, kecuali di Kota Kupang, Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu dan Kab. Alor serta di seluruh Pulau Sumba. Konflik antara lain karena kemajemukan tinggi dan juga kerap terjadi konflik perebutan sumber daya alam. Rata - rata wilayah di NTT memiliki kerentanan sedang terhadap konflik sosial.

1.3.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) perkapita menurut Lapangan Usaha (LU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 sebesar Rp.21,72 juta atau meningkat Rp.1,14 juta dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp.20,58 juta. Data ini dapat menggambarkan bahwa pendapatan tiap penduduk NTT secara rata-rata pada Tahun 2022 mencapai Rp.20,58 juta.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian NTT tahun 2022 tumbuh sebesar 3,05 persen atau meningkat 0,53% dibandingkan Tahun 2021 sebesar 2,52%, Pertumbuhan ekonomi terbesar pada tahun 2022 terjadi pada lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 18,40 persen, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,08 persen dan Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 6,67 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi NTT pada tahun 2022, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberikan kontribusi terbesar dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi NTT dengan nilai sebesar 1,05 persen, Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,82 persen dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,44 persen.

Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mendominasi perekonomian NTT pada tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 29,60 persen, Selanjutnya diikuti oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 12,82 persen dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,05 persen.

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Provinsi NTT yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Provinsi NTT 2023-2027 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.1.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Provinsi NTT Tahun 2022

Provinsi	SPM Bidang Pendidikan Provinsi					
	Pendidikan Menengah			Pendidikan Khusus		
	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah			Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
NTT	928	928	100	44	44	100

Sumber: LaporanSPM Daerah

2.1.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Provinsi NTT Tahun 2022

Provinsi	SPM Bidang Kesehatan (Provinsi)					
	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi			Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian(%)
NTT	12.376	12.376	100%	3.042	3.042	100%

Sumber: LaporanSPM Daerah

2.1.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Provinsi NTT Tahun 2022

Provinsi	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota			Penyediaan pelayanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian(%)
NTT	2.069	1.622	78%	0	0	0%

Sumber : Laporan SPM Daerah

2.1.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Provinsi NTT Tahun 2022

Provinsi	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian(%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian(%)
NTT	0	0	0	0	0	0

Sumber : Laporan SPM Daerah

Provinsi	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di panti			Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti			Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			Rehabilitasi sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan Napza di dalam panti;			Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (F)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
NTT	50	50	100%	270	270	100%	131	131	100%	50	50	100%	1	1	100%		

Sumber: LaporanSPM Daerah

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Provinsi NTT ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Provinsi NTT secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Data Seluruh Penduduk Penyandang Disabilitas berdasarkan Usia masih belum tersedia;
- 2) Penyerapan program dan Anggaran mengalami Refocusing;
- 3) Tidak Optimalnya Pengkajian serta Pengawasan lebih ketat tentang Ijin Operasional pembangunan Sekolah Baru baik Negeri dan Swasta;
- 4) Tidak Optimalnya Pengkajian serta Pengawasan lebih ketat tentang Ijin Operasional pembangunan Sekolah Baru baik Negeri dan Swasta;

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Pencatatan dan pelaporan dari Fasilitas Kesehatan Swasta belum terakomodir dengan baik.
- 2) Pelaporan belum tepat waktu.
- 3) Ketersediaan SDM yang terlibat dalam layanan masih dibutuhkan.
- 4) Anggaran untuk pendataan prakrisis belum tersedia.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Provinsi secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran yang sangat terbatas;

- 2) Belum tersedianya basis data yang akurat;
- 3) Belum terintegrasinya program, kegiatan dan sub kegiatan SPM terutama sub bidang air bersih dalam dokumen perencanaan sehingga indikator layanan belum tercapai;
- 4) Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SPM seperti jaringan air bersih layak minum.

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Provinsi NTT secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya alokasi anggaran;
- 2) Belum terintegrasi dan terinternalisasinya program, kegiatan dan sub kegiatan kebencanaan;
- 3) Minimnya sarana dan prasarana terhadap penunjang mutu layanan;
- 4) Status Tanah yang tidak jelas;
- 5) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Provinsi NTT secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
- 2) Tidak adanya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja Perangkat Daerah;
- 3) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;
- 4) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
- 5) Dukungan peralatan penanggulangan bencana yang masih terbatas di 22 Kabupaten/Kota;
- 6) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Provinsi NTT berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
- 3) Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.
- 4) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM.

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN
PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Provinsi NTT Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
	Program SPM Pendidikan anak usia 16-18 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK)	1 Pendataan warga negara usia 16 (enam belas) sampai 18 (delapan belas)tahun yang tidak sekolah	Peserta didik
			2 pemberian biaya pendidikan kepada peserta didikdari keluarga tak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 penyediaan layanan pendidikandi wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal	Peserta didik

		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK)	1 pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Unit komunitas
			2 Fasilitas pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan (SMA/SMK/PAKET C/MA/MAK)	1 pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3 perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4 sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya	Kegiatan
			kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/PAKET C)	1 pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2 distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Guru
			4 penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5 penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6 penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			7 pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Kegiatan
Program SPM Pendidikan Menengah		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SMA/SMK/PAKET C)	1 peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan

			2 pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
		kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	1 Fasilitasi kemitraan dunia kerja dan SMK untuk menyesuaikan pembelajaran di SMK terhadap duniakerja	Kegiatan
Program SPM pendidikan khusus	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Pendidikan Khusus		1 Pendataan warga negara usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun penyandang disabilitas yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2 pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3 penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4 penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar dan tertinggal	Peserta didik
	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Pendidikan Khusus		1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	unit komunitas
			2 pelatihan / seminar / lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
	pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan		1 pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2 pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3 perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4 sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan

	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	1 pemetaan dan penataan penempatan unuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
		2 distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
		3 pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Guru
		4 penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
		5 penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
		6 penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
		7 pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	pengawas
	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan khusus	1 peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	kegiatan
		2 pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	pendidik dan tenaga kependidikan
		3 fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	kegiatan

3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Orang
			2 Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Orang

3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/ peningkatan/ perluasan/ perbaikan SPAM	Liter /Detik
			3	Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan	Liter /Detik
			4	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan	SR
			5	Perluasan SPAM jaringan perpipaan	Dokumen
			6	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan	SR
			7	Fasilitasi kerja sama pengelolaan SPAM regional lintas Kabupaten/Kota	Kabupaten/ Kota
			8	Pembinaan teknis SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Provinsi	Kabupaten/ Kota
			9	Operasi dan pemeliharaan SPAM lintas Kabupaten/Kota	Unit
			10	Survei dan investigasi untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/ Kota	Dokumen
			11	Penyediaan lahan untuk pengembangan SPAM lintas Kabupaten/ Kota	Ha
			12	Pembentukan organisasi pengelola SPAM lintas Kabupaten/Kota	Badan Usaha
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dokumen
			2	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan pembinaan penyediaan prasarana Cubluk	Dokumen
			3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik regional	Rumah Tangga
			5	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat	Dokumen
			6	Pembinaan teknis dan pemberdayaan masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			7 Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8 Fasilitasi kerja sama Pengelolaan Air Limbah Domestik lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
			9 Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit

3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGEMBANGA NPERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen
			2 Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3 Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4 Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
			5 Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Provinsi	Dokumen
			6 Pendataan rumah sewa milik masyarakat rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Provinsi	Dokumen
			3 Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4 Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			5 Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Provinsi	UnitRumah
			6 Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Provinsi	Unit Rumah

3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, Pembinaan dan penyuluhan, Pelaksanaan patroli, Pengamanan dan Pengawalan	Kasus
			2 Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus
			3 Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Provinsi	Dokumen
			4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen
			5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Dokumen
			7 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Dokumen
			8 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sistem Informasi Elektronik
		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	1 Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
			2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
			3 Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	1 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan		
2	Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	1 Penyediaan dan Pemuktahiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta rawan	Peta

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
	Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran		kebakran	
			2 Bimbingan teknis terkait pencegahan penanggulangan, penyelamatan	Laporan
			kebakaran dan penyelamatan non kebakran Provinsi dan Kabupaten/Kota	
			3 Penyusunan dan pemuktahiran rencana induk sistem proteksi kebakaran	Laporan

3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	1 Penyediaan permakanan	Orang
			2 Penyediaan Sandang	Orang
			3 Penyediaan asrama yang mudah diakses	Orang
			4 Penyediaan alat bantu	Buah
			5 Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Paket
			6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Paket
			7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Paket
			8 Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang
			9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Pengasuhan	Orang
			2 Penyediaan makanan	Orang
			3 Penyediaan sandang	Orang
			4 Penyediaan asrama yang mudah diakses	Buah
			5 Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Paket
			6 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Paket
			7 Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Paket
			8 Fasilitasi pemhuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk	Orang

NO	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
			Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	
			9 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			12 Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang
			13 Pengasuhan	Dokumen
			14 Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Orang

3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Provinsi NTT 2023-2027

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Provinsi										
1	Pendidikan Menengah	orang	2022	usia 16-18							
	SMA	orang									
a	Angka partisipasi kasar	%	2022			53.48	53.48	0		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov. NTT
b	Angka partisipasi sekolah	%	2022			60.10	60.10	268,511,265,170		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov. NTT
c	Angka partisipasi murni	%	2022			50.56	50.56	0		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov. NTT
d	Kemampuan literasi	Nilai	2022			55.80	55.80	12,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov. NTT
e	Kemampuan numerasi	Nilai	2022			49.80	49.80			APBN	Dinas P dan K Prov. NTT
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022			10	10			APBN	Dinas P dan K Prov. NTT
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022			10	10			APBN	Dinas P dan K Prov. NTT
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022			80.89	80.89			APBN	Dinas P dan K Prov. NTT
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2022			80	80			APBN	Dinas P dan K Prov. NTT
j	Kecukupan formasi guru ASN	orang	2022			2,500	2,500	13,442,250,000		APBN	Dinas P dan K Prov. NTT
k	Indeks Distribusi Guru	orang	2022			114	114			APBN	Dinas P dan K Prov. NTT
l	Proporsi PTK bersertifikat	orang	2022			1,564	1,564			APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov. NTT
m	Proporsi PTK penggerak	orang	2022			551	551			APBN	Dinas P dan K Prov. NTT

n	Pengalaman pelatihan guru	orang	2022			1,700	1,700			APBN, Lembaga pendonor dalam dan luarNegeri	Dinas P dan K Prov.NTT
SMK											
a	Angka partisipasi kasar	%	2022	86.38	86.38	53.48	53.48	0		APBN (Dana transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
b	Angka partisipasi sekolah	%	2022	75.55	75.55	60.10	60.10	242,759,247,670		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
c	Angka partisipasi murni	%	2022	56	56	50.56	50.56	0		APBN (Dana TransferDaerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
d	Kemampuan literasi	Nilai	2022	61.30	61.30	55.80	55.80			APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
e	Kemampuan numerasi	Nilai	2022	52.13	52.13	49.80	49.80			APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
f	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	2022	68.50	68.50	70.50	70.50	1,425,000.000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
g	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerjalulusan SMK	Nilai	2022	70.80	70.80	85.25	85.25	500,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
h	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022	61.30	61.30	10	10	501,425,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
i	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022	52.13	52.13	10	10			APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
j	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022	81.90	81.90	80.89	80.89			APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
k	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2022	80.97	80.97	80	80			APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
l	Kecukupan formasi guru ASN	orang	2022	3,244	3,244	2,500	2,500			APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
m	Indeks Distribusi Guru	orang	2022	8,733	8,733	114	114			APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
n	Proporsi PTK bersertifikat	orang	2022	1,990	1,990	1,564	1,564			APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
o	Proporsi PTK penggerak	orang	2022	1,936	1,936	551	551			APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
p	Pengalaman Pelatihan Guru	orang	2022	1,990	1,990	1,700	1,700	1,000,000,000		Pendanaan dari Donatur dari dalam dan luar negeri	Dinas P dan K Prov.NTT

2	Pendidikan Khusus										
a	Angka partisipasi kasar	%	2022	89.88	89.88	75.2	75.2	0		APBN(Dana Transfer Daerah)	Dinas Prov
b	Angka partisipasi sekolah	%	2022	94.83	94.83	75.28	75.28	13,313,523,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas Prov
c	Angka partisipasi murni	%	2022	56.02	56.02	50.26	50.26	0		APBN(Dana Transfer Daerah)	Dinas Prov
d	Kemampuan literasi	Nilai	2022	63.01	63.01	70.58	70.58			APBN	Dinas Prov
e	Kemampuan numerasi	Nilai	2022	54.93	54.93	72.58	72.58			APBN	Dinas Prov
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022	63.01	63.01	20.00	20.00			APBN	Dinas Prov
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022	54.93	54.93	20.30	20.30			APBN	Dinas Prov
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022	82.52	82.52	90.80	90.80			APBN	Dinas Prov
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2022	163.48	163.48	92.57	92.57			APBN	Dinas Prov
j	Kecukupan formasi guru ASN	orang	2022	256	256	256	256			APBN	Dinas Prov
k	Indeks Distribusi Guru	orang	2022	683	683	31	31			APBN	Dinas Prov
l	Proporsi PTK bersertifikat	orang	2022	151	151	102	102			APBN	Dinas Prov
m	Proporsi PTK penggerak	orang	2022	121	121	105	105			APBN	Dinas Prov
n	Pengalaman pelatihan guru	orang	2022	151	151	151	151			APBN, Lembaga pendonor dalam dan luarNegeri	Dinas Prov

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Provinsi										
1	Pendidikan Menengah SMA	orang	2022								
a	Angka partisipasi kasar	%	2022	86.5	86.5	54.98	54.98	1,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
b	Angka partisipasi sekolah	%	2022	75.7	75.7	60.58	60.58	10,500,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
c	Angka partisipasi murni	%	2022	57	57	51.82	51.82	1,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
d	Kemampuan literasi	Nilai	2022	62.81	62.81	56.80	56.80	12,500,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
e	Kemampuan numerasi	Nilai	2022	53.8	53.8	50.80	50.80	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022	61.9	61.9	12	12	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022	53.53	53.53	12	12	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022	82.25	82.25	81.56	81.56	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2022	80.83	80.83	85.03	85.03	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
j	Kecukupan formasi guru ASN	orang	2022	6,414	6,414	2,600	2,600	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
k	Indeks Distribusi Guru	orang	2022	16,300	16,300	118	118	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
l	Proporsi PTK bersertifikat	orang	2022	3,802	3,802	1,598	1,598	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
m	Proporsi PTK penggerak	orang	2022	4,150	4,150	564	564	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
n	Pengalaman pelatihan guru	orang	2022	3,784	3,784	1,800	1,800	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT

	SMK										
a	Angka partisipasi kasar	%	2022	88.25	88.25	54.48	51	1,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
b	Angka partisipasi sekolah	%	2022	76.26	76.26	61.10	51	1,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
c	Angka partisipasi murni	%	2022	58	58	51.56	61	1,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
d	Kemampuan literasi	Nilai	2022	61.80	61.80	56.80	49.80	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
e	Kemampuan numerasi	Nilai	2022	52.75	52.75	50.80	49.53	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
f	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	2022	69.80	69.80	71.50	70.85	1,500,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
g	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerjalulusan SMK	Nilai	2022	71.24	71.24	85.35	86.50	600,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
h	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022	61.80	61.80	15	12.60	700,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
i	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022	52.64	52.64	15	12.60	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
j	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022	82.58	82.58	81.25	80.9	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
k	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2022	81.62	81.62	81	84.75	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
l	Kecukupan formasi guru ASN	orang	2022	3,335	3,335	2,600	3,300	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
m	Indeks Distribusi Guru	orang	2022	8,887	8,887	114	125	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
n	Proporsi PTK bersertifikat	orang	2022	2,021	2,021	1,625	1,600	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
o	Proporsi PTK penggerak	orang	2022	2,020	2,020	600	500	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
p	Pengalaman pelatihan guru	orang	2022	2,023	2,023	1,800	1,700	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT

2	Pendidikan Khusus										
a	Angka partisipasi kasar	%	202 2	89.95	89.95	76.25	76.25	1,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
b	Angka partisipasi sekolah	%	202 2	95.10	95.10	75.35	75.35	12,530,330,000		APBN(Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
c	Angka partisipasi murni	%	202 2	57.25	57.25	50.48	50.48	1,000,000,000		APBN(Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
d	Kemampuan literasi	Nilai	202 2	64.01	64.01	70.9	70.9	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
e	Kemampuan numerasi	Nilai	202 2	55.97	55.97	73.10	73.10	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	202 2	64.01	64.01	25.00	25.00	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	202 2	55.2	55.2	20.80	20.80	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	202 2	84.19	84.19	91.89	91.89	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	202 2	164.85	164.85	92.60	92.60	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
j	Kecukupan formasi guru ASN	orang	202 2	300	300	270	270	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
k	Indeks Distribusi Guru	orang	202 2	700	700	38	38	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
l	Proporsi PTK bersertifikat	orang	202 2	160	160	122	122	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
m	Proporsi PTK penggerak	orang	202 2	132	132	120	120	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
n	Pengalaman pelatihan guru	orang	202 2	165	165	159	159	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provinsi											
1	Pendidikan Menengah SMA	orang	2022								
a	Angka partisipasi kasar	%	2022	87.5	87.5	54.98	54.98	2,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
b	Angka partisipasi sekolah	%	2022	75.78	75.78	61.58	61.58	1,100,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
c	Angka partisipasi murni	%	2022	60	60	52.82	52.82	2,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
d	Kemampuan literasi	Nilai	2022	63.5	63.5	57.80	57.80	13,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
e	Kemampuan numerasi	Nilai	2022	54.5	54.5	51.80	51.80	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022	62.8	62.8	14	14	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022	54.55	54.55	14	14	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022	83.25	83.25	82.56	82.56	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2022	80.83	80.83	86.03	86.03	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
j	Kecukupan formasi guru ASN	orang	2022	6,500	6,500	2,700	2,700	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
k	Indeks Distribusi Guru	orang	2022	16,500	16,500	123	123	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
l	Proporsi PTK bersertifikat	orang	2022	3,900	3,900	1,689	1,689	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
m	Proporsi PTK penggerak	orang	2022	4,150	4,150	589	589	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
n	Pengalaman pelatihan guru	orang	2022	3,800	3,800	1,900	1,900	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT

	SMK										
a	Angka partisipasi kasar	%	2022	89.25	89.25	55.48	55.48	2,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
b	Angka partisipasi sekolah	%	2022	77.26	77.26	62.10	62.10	2,000,000,000		APBN(Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
c	Angka partisipasi murni	%	2022	67	67	52.56	52.56	2,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
d	Kemampuan literasi	Nilai	2022	63.80	63.80	57.80	57.80	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
e	Kemampuan numerasi	Nilai	2022	53.75	53.75	51.80	51.80	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
f	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	2022	69.90	69.90	72.50	72.50	1,600,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
g	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	Nilai	2022	72.30	72.30	86.35	86.35	700,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
h	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022	62.50	62.50	10	10	800,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
i	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022	53.55	53.55	10	10	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
j	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022	83.40	83.40	82.45	82.45	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
k	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2022	82.62	82.62	82	82	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
l	Kecukupan formasi guru ASN	orang	2022	3,509	3,509	2,700	2,700	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
m	Indeks Distribusi Guru	orang	2022	8,900	8,900	125	125	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
n	Proporsi PTK bersertifikat	orang	2022	2,120	2,120	1,725	1,725	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
o	Proporsi PTK penggerak	orang	2022	2,200	2,200	650	650	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
p	Pengalaman pelatihan guru	orang	2022	2,230	2,230	1,850	1,850	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT

2	Pendidikan Khusus										
a	Angka partisipasi kasar	%	2022	90.05	90.05	77.25	77.25	2,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov. NTT
b	Angka partisipasi sekolah	%	2022	95.50	95.50	76.35	76.35	13,530,330,000		APBN(Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
c	Angka partisipasi murni	%	2022	58.45	58.45	51.48	51.48	2,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
d	Kemampuan literasi	Nilai	2022	65.20	65.20	77.80	77.80	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
e	Kemampuan numerasi	Nilai	2022	58.68	58.68	74.20	74.20	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022	64.01	64.01	28.00	28.00	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022	55.2	55.2	22.80	22.80	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022	84.19	84.19	92.29	92.29	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2022	166.63	166.63	93.69	93.69	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
j	Kecukupan formasi guru ASN	orang	2022	320	320	280	280	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
k	Indeks Distribusi Guru	orang	2022	750	750	40	40	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
l	Proporsi PTK bersertifikat	orang	2022	165	165	137	137	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
m	Proporsi PTK penggerak	orang	2022	140	140	137	137	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
n	Pengalaman pelatihan guru	orang	2022	170	170	169	169	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provinsi											
1	Pendidikan Menengah SMA	orang	2022								
a	Angka partisipasi kasar	%	2022	88.5	88.5	53.6	53.6	2,500,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
b	Angka partisipasi sekolah	%	2022	75.78	75.78	62.58	62.58	1,200,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
c	Angka partisipasi murni	%	2022	60	60	54.82	54.82	2,500,000,000		APBN(Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
d	Kemampuan literasi	Nilai	2022	63.5	63.5	59.80	59.80	14,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
e	Kemampuan numerasi	Nilai	2022	54.5	54.5	53.80	53.80	2,500,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022	62.8	62.8	12	12	2,500,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022	54.55	54.55	12	12	2,500,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022	83.25	83.25	84.56	84.56	2,500,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2022	81.83	81.83	87.58	87.58	2,500,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
j	Kecukupan formasi guru ASN	orang	2022	6,600	6,600	2,900	2,900	2,500,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
k	Indeks Distribusi Guru	orang	2022	17,000	17,000	132	132	2,500,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
l	Proporsi PTK bersertifikat	orang	2022	3,950	3,950	1,800	1,800	2,500,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
m	Proporsi PTK penggerak	orang	2022	4,300	4,300	700	700	2,500,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
n	Pengalaman pelatihan guru	orang	2022	3,850	3,850	2,000	2,000	2,500,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT

	SMK										
a	Angka partisipasi kasar	%	2022	89.48	89.48	56.48	56.48	2,700,000,000		APBN(Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
b	Angka partisipasi sekolah	%	2022	78.26	78.26	63.10	63.10	2,700,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
c	Angka partisipasi murni	%	2022	68	68	53.56	53.56	2,700,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
d	Kemampuan literasi	Nilai	2022	64.00	64.00	58.80	58.80	2,700,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
e	Kemampuan numerasi	Nilai	2022	54.75	54.75	52.80	52.80	2,700,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
f	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	2022	709.00	709.00	73.50	73.50	1,700,000.000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
g	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusanSMK	Nilai	2022	733.00	733.00	87.35	87.35	800,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
h	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022	63.50	63.50	8	8	900,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
i	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022	54.55	54.55	8	8	2,700,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
j	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022	84.40	84.40	83.45	83.45	2,700,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
k	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2022	80.00	127.82	83	83	2,700,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
l	Kecukupan formasi guru ASN	orang	2022	3,600	3,600	2,800	2,800	2,700,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
m	Indeks Distribusi Guru	orang	2022	9,000	9,000	127	127	2,700,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
n	Proporsi PTK bersertifikat	orang	2022	2,320	2,320	1,800	1,800	2,700,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
o	Proporsi PTK penggerak	orang	2022	2,350	2,350	700	700	2,700,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
p	Pengalaman pelatihan guru	orang	2022	2,314	2,314	1,950	1,950	2,700,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
2	Pendidikan Khusus										
a	Angka partisipasi kasar	%	2022	91.05	91.05	78.25	78.25	2,300,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov. NTT

b	Angka partisipasi sekolah	%	2022	95.89	95.89	77.35	77.35	14,530,330,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
c	Angka partisipasi murni	%	2022	59.45	59.45	52.48	52.48	2,300,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
d	Kemampuan literasi	Nilai	2022	66.20	66.20	78.80	78.80	2,300,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
e	Kemampuan numerasi	Nilai	2022	63.02	63.02	75.20	75.20	2,300,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022	65.01	65.01	30.00	30.00	2,300,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022	56.2	56.2	30.00	30.00	2,300,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022	84.19	84.19	93.29	93.29	2,300,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2022	166.63	166.63	94.69	94.69	2,300,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
j	Kecukupan formasi guru ASN	orang	2022	400	400	300	300	2,300,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
k	Indeks Distribusi Guru	orang	2022	800	800	41	41	2,300,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
l	Proporsi PTK bersertifikat	orang	2022	185	185	142	142	2,300,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
m	Proporsi PTK penggerak	orang	2022	156	156	142	142	2,300,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
n	Pengalaman pelatihan guru	orang	2022	160	160	167	167	2,300,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT

N O	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar(N)	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Provinsi										
1	Pendidikan Menengah	orang	2022								
	SMA	orang									
a	Angka partisipasi kasar	%	2022	89.5	89.5	54.6	54.6	2,800,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
b	Angka partisipasi sekolah	%	2022	76.78	76.78	63.58	63.58	1,300,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
c	Angka partisipasi murni	%	2022	65	65	55.82	55.82	2,800,000,000		APBN(Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
d	Kemampuan literasi	Nilai	2022	64.5	64.5	60.80	60.80	15,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
e	Kemampuan numerasi	Nilai	2022	55.5	55.5	54.80	54.80	2,800,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022	63.8	63.8	12	12	2,800,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022	55.55	55.55	12	12	2,800,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022	84.25	84.25	85.56	85.56	2,800,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2022	82.83	82.83	88.58	88.58	2,800,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
j	Kecukupan formasi guru ASN	orang	2022	6,700	6,700	3,000	3,000	2,800,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
k	Indeks Distribusi Guru	orang	2022	17,500	17,500	136	136	2,800,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
l	Proporsi PTK bersertifikat	orang	2022	4,000	4,000	1,900	1,900	2,800,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
m	Proporsi PTK penggerak	orang	2022	4,350	4,350	750	750	2,800,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov. NTT
n	Pengalaman pelatihan guru	orang	2022	3,950	3,950	2,225	2,225	2,800,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT

	SMK										
a	Angka partisipasi kasar	%	202 2	90.48	90.48	57.48	57.48	3,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
b	Angka partisipasi sekolah	%	202 2	79.26	79.26	64.10	64.10	3,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
c	Angka partisipasi murni	%	202 2	68	68	54.56	54.56	3,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
d	Kemampuan literasi	Nilai	202 2	65.00	65.00	59.80	59.80	3,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
e	Kemampuan numerasi	Nilai	202 2	55.75	55.75	53.80	53.80	3,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
f	Tingkat penyerapan lulusan SMK	Nilai	202 2	720	720	74.50	74.50	1,800,000.000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
g	Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusanSMK	Nilai	202 2	750	750	88.35	88.35	900,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
h	Perbedaan skor literasi	Nilai	202 2	64.50	64.50	10	10	1,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
i	Perbedaan skor numerasi	Nilai	202 2	55.55	55.55	10	10	3,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
j	Indeks iklim keamanan	Nilai	202 2	84.40	84.40	84.45	84.45	3,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
k	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	202 2	80.56	80.56	83.88	83.88	3,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
l	Kecukupan formasi guru ASN	orang	202 2	3,700	3,700	2,900	2,900	3,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
m	Indeks Distribusi Guru	orang	202 2	9,500	9,500	132	132	3,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
n	Proporsi PTK bersertifikat	orang	202 2	2,420	2,420	1,900	1,900	3,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
o	Proporsi PTK penggerak	orang	202 2	2,450	2,450	800	800	3,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
p	Pengalaman pelatihan guru	orang	202 2	2,414	2,414	2,000	2,000	3,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT

2	Pendidikan Khusus										
a	Angka partisipasi kasar	%	2022	92.05	92.05	78.9	78.9	2,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
b	Angka partisipasi sekolah	%	2022	96.89	96.89	77.89	77.89	15,530,330,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
c	Angka partisipasi murni	%	2022	60.43	60.43	52.9	52.9	2,000,000,000		APBN (Dana Transfer Daerah)	Dinas P dan K Prov.NTT
d	Kemampuan literasi	Nilai	2022	67.20	67.20	80.20	80.20	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
e	Kemampuan numerasi	Nilai	2022	64.02	64.02	76.20	76.20	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
f	Perbedaan skor literasi	Nilai	2022	65.59	65.59	32.00	32.00	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
g	Perbedaan skor numerasi	Nilai	2022	57.2	57.2	32, 38	32, 38	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
h	Indeks iklim keamanan	Nilai	2022	84.71	84.71	93.58	93.58	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
i	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas	Nilai	2022	168.31	168.31	95.69	95.69	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
j	Kecukupan formasi guru ASN	orang	2022	450	450	350	350	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
k	Indeks Distribusi Guru	orang	2022	850	850	50	50	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
l	Proporsi PTK bersertifikat	orang	2022	200	200	160	160	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
m	Proporsi PTK penggerak	orang	2022	204	204	162	162	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT
n	Pengalaman pelatihan guru	orang	2022	220	220	180	180	2,000,000,000		APBN	Dinas P dan K Prov.NTT

Keterangan:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM

Kolom 3 : Diisi Satuan yang sudah ditentukan

Kolom 4 : Diisi Tahun Dasar (N)

Kolom 5 : Diisi dengan target penerima layanan dasar

Kolom 6 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya

Kolom 7 : Diisi target mutu layanan dasar

Kolom 8 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya

Kolom 9 : Diisi anggaran

Kolom 10: Diisi inisiasi

Kolom 11 : Diisi tentang sumber pendanaan
Kolom 12 : Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM
Kolom 13 : Diisi dengan target penerima layanan dasar
Kolom 14 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 15 : Diisi target mutu layanan dasar
Kolom 16 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 17 : Diisi anggaran
Kolom 18 : Diisi inisiasi
Kolom 19 : Diisi tentang sumber pendanaan
Kolom 20 : Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM
Kolom 21 : Diisi dengan target penerima layanan dasar
Kolom 22 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 23 : Diisi target mutu layanan dasar
Kolom 24 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 25 : Diisi anggaran
Kolom 26 : Diisi inisiasi
Kolom 27 : Diisi tentang sumber pendanaan
Kolom 28 : Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM
Kolom 29 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar
Kolom 30 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 31 : Diisi target mutu layanan dasar
Kolom 32 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 33 : Diisi anggaran
Kolom 34 : Diisi inisiasi
Kolom 35 : Diisi tentang sumber pendanaan
Kolom 36 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM
Kolom 37 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar
Kolom 38 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 39 : Diisi target mutu layanan dasar
Kolom 40 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 41 : Diisi anggaran
Kolom 42 : Diisi inisiasi
Kolom 43 : Diisi tentang sumber pendanaan
Kolom 44 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM

Tabel 3.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Provinsi NTT 2023-2027

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2023	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	orang	12376	23,092	-			8,328,763,123		APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
	Pra Krisis Kesehatan*										
a	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (Peserta/Masyarakat, Petugas)	KAB	-			22	22	424,192,968	-	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
	Tahap tanggap darurat*										
	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak bencana/ berpotensi bencana					22	22	3,000,000,000			
a	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	<i>paket</i>				85	85	1,040,820,155	-	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
b	Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.)	<i>paket</i>	-			85	85	850,000,000	-	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
c	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	<i>paket</i>	-			85	85	63,750,000	-	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
d	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>	-			23	15	850,000,000	8	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
e	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	-			46	4	350,000,000	42	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
f	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	-			69	6	350,000,000	63	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
g	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	<i>Orang</i>	-			23	19	350,000,000	4	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
h	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	<i>Orang</i>	-			1	2	350,000,000	(1)	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT

i	Apoteker dan/ atau asisten apoteker	Orang	-			23	5	350,000,000	18	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
j	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	-			23	2	350,000,000	21	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	orang	3042	370				12,458,455,700		APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
a	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	13500			13500	13500	1,481,625,000	-		
b	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	Unit	600			600	600	6,000,000,000	-		
c	Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier	Unit	28			28	28	112,000	-		
d	Tempat sampah biologis	Unit	7			7	7	1,462,300	-		
e	Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan	Set	154			154	154	7,176,400	-		
f	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit	105			105	105	420,000	-		
g	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	105			105	105	315,000,000	-		
	Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di luar fasilitas layanan kesehatan dilakukan oleh Tim Gerak Cepat (SK Dinas Provinsi) terdiri dari									APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
h	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23			23	23	492,950,000	-		
i	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	23			23	23	382,950,000	-		
j	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	23			23	23	382,950,000	-		
k	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	23			23	7	382,950,000	16		

l	Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium	Orang	23			23	23	144,900,000	-		
m	Tenaga kesehatan : Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	23			23	23	832,500,000	-		
n	Tenaga kesehatan : Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	42			42	42	699,300,000	-		
	<i>Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di dalam fasilitas layanan kesehatan</i>										
o	Tenaga kesehatan : Dokter (umum dan spesialis)	Orang	436			436	436	444,720,000			
p	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	436			436	436	444,720,000	-		
q	Tenaga kesehatan : Petugas Radiologi	Orang	436			436	-		436		
r	Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium	Orang	436			436	436	444,720,000	-		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	orang	12376	23,092	-			9,850,000,000		APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
	Pra Krisis Kesehatan*										
a	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (Peserta/ Masyarakat, Petugas)	KAB	-			22	-	500,000,000	22	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
	Tahap tanggap darurat*										
	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak bencana/ berpotensi bencana					22	-	3,300,000,000			
a	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	<i>paket</i>				85	-	1,100,000,000	85	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
b	Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.)	<i>paket</i>	-			85	-	850,000,000	85	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
c	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	<i>paket</i>	-			85	-	100,000,000	85	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
d	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>	-			23	-	1,000,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
e	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	-			46	-	500,000,000	46	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
f	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	-			69	-	500,000,000	69	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
g	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatanreproduksi, dan lain-lain	<i>Orang</i>	-			23	-	500,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
h	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	<i>Orang</i>	-			1	-	500,000,000	1	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT

i	Apoteker dan/atau asisten apoteker	Orang	-			23	-	500,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
j	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	-			23	-	500,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	orang	3042	3,042	3,042			14,015,605,270		APBD, APBN	Dinkes Prov. NTT
a	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	13500			13500		1,629,787,500			
b	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	Unit	600			600		6,600,000,000			
c	Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier	Unit	28			28		123,200			
d	Tempat sampah biologis	Unit	7			7		1,608,530			
e	Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan	Set	154			154		7,894,040			
f	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit	105			105		462,000			
g	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	105			105		346,500,000			
	Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di luar fasilitas layanan kesehatan dilakukan oleh Tim Gerak Cepat (SK Dinas Provinsi) terdiri dari							2,102,340,791		APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
h	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23			23		542,245,000			
i	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	23			23		421,245,000			
j	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	23			23		421,245,000			
k	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	23			23		421,245,000			

l	Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium	Orang	23			23		159,390,000			
m	Tenaga kesehatan : Tenaga penyuluh/ promosi kesehatan	Orang	23			23		915,750,000			
n	Tenaga kesehatan : Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	42			42		769,230,000			
	Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di dalam fasilitas layanan kesehatan										
o	Tenaga kesehatan : Dokter (umum dan spesialis)	Orang	436			436	436	444,720,000	-		
p	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	436			436	436	444,720,000	-		
q	Tenaga kesehatan : Petugas Radiologi	Orang	436			436	-	444,720,000	436		
r	Tenaga kesehatan: Tenaga Laboratorium	Orang	436			436	436	444,720,000	-		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	orang	12376	23,092	-			11,038,494,140		APBD/APBN	Dinkes
	Pra Krisis Kesehatan*										
a	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (Peserta/Masyarakat, Petugas)	KAB	-			22	-	353,494,140	22	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
	Tahap tanggap darurat*										
	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak bencana/ berpotensi bencana					22	-	3,630,000,000			
a	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	paket				85	-	1,210,000,000	85	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
b	Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MPASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.)	paket	-			85	-	935,000,000	85	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
c	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	paket	-			85	-	110,000,000	85	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	-			23	-	1,500,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			46	-	550,000,000	46	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			69	-	550,000,000	69	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
g	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	Orang	-			23	-	550,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
h	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang	-			1	-	550,000,000	1	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
i	Apoteker dan/atau asisten apoteker	Orang	-			23	-	550,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT

j	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	-			23	-	550,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	orang	3042	3,042	3,042			15,239,277,797		APBD, APBN	Dinkes Prov. NTT
a	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	13500			13500		1,792,766,250			
b	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	Unit	600			600		7,260,000,000			
c	Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier	Unit	28			28		135,520			
d	Tempat sampah biologis	Unit	7			7		1,769,383			
e	Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan	Set	154			154		8,683,444			
f	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit	105			105		508,200			
g	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	105			105		381,150,000			
	Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di luar fasilitas layanan kesehatan dilakukan oleh Tim Gerak Cepat (SK Dinas Provinsi) terdiri dari							2,285,891,670		APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
h	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23			23		596,469,500			
i	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	23			23		463,369,500			
j	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	23			23		463,369,500			
k	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	23			23		463,369,500			
l	Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium	Orang	23			23		175,329,000			

m	Tenaga kesehatan: Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	23			23		1,007,325,000			
n	Tenaga kesehatan : Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	42			42		846,153,000			
	<i>Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di dalam fasilitas layanan kesehatan</i>										
o	Tenaga kesehatan : Dokter (umum dan spesialis)	Orang	436			436	436	444,720,000	-		
p	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	436			436	436	444,720,000	-		
q	Tenaga kesehatan : Petugas Radiologi	Orang	436			436	-	444,720,000	436		
r	Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium	Orang	436			436	436	444,720,000	-		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	orang	12376	23,092	-			11,626,994,140		APBD/APBN	Dinkes
	Pra Krisis Kesehatan*										
a	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (Peserta/Masyarakat, Petugas)	KAB	-			22	-	353,494,140	22	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
	Tahap tanggap darurat*										
	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak bencana/ berpotensi bencana					22	-	3,993,000,000			
a	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	<i>paket</i>				85	-	1,331,000,000	85	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
b	Makanan tambahan/ pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.)	<i>paket</i>	-			85	-	1,028,500,000	85	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
c	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	<i>paket</i>	-			85	-	121,000,000	85	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
d	Tenaga kesehatan : Dokter	<i>Orang</i>	-			23	-	1,500,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
e	Tenaga kesehatan : Bidan	<i>Orang</i>	-			46	-	550,000,000	46	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
f	Tenaga kesehatan : Perawat	<i>Orang</i>	-			69	-	550,000,000	69	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
g	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	<i>Orang</i>	-			23	-	550,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
h	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	<i>Orang</i>	-			1	-	550,000,000	1	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT

i	Apoteker dan/ atau asisten apoteker	Orang	-			23	-	550,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov NTT
j	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	-			23	-	550,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov NTT
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	orang	3042	3,042	3,042			19,446,284,859		APBD/APBN	Dinkes Prov NTT
a	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	13500			13500		1,972,042,875			
b	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	Unit	600			600		7,986,000,000			
c	Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier	Unit	28			28		149,072			
d	Tempat sampah biologis	Unit	7			7		1,946,321			
e	Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan	Set	154			154		9,551,788			
f	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit	105			105		559,020			
g	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	105			105		419,265,000			
	Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di luar fasilitas layanan kesehatan dilakukan oleh Tim Gerak Cepat (SK Dinas Provinsi) terdiri dari							2,916,942,729		APBD/APBN	Dinkes Prov NTT
h	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23			23		656,116,450			
i	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	23			23		509,706,450			
j	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	23			23		509,706,450			
k	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	23			23		509,706,450			

l	Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium	Orang	23			23		192,861,900			
m	Tenaga kesehatan : Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	23			23		1,108,057,500			
n	Tenaga kesehatan : Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	42			42		930,768,300			
	Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di dalam fasilitas layanan kesehatan										
o	Tenaga kesehatan : Dokter (umum dan spesialis)	Orang	436			436	436	444,720,000	-	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
p	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	436			436	436	444,720,000	-		
q	Tenaga kesehatan : Petugas Radiologi	Orang	436			436	-	444,720,000	436		
r	Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium	Orang	436			436	436	444,720,000	-		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SFM	Satuan	Tahun Dasar 2022	Pencapaian SPM (2027)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana		
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar				Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi	orang	12376	23,092	-			13,074,344,140		APBD/APBN	Dinkes
	Pra Krisis Kesehatan*										
a	Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana (Peserta/Masyarakat, Petugas)	KAB	-			22	-	353,494,140	22	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
	Tahap tanggap darurat*										
	Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak bencana/ berpotensi bencana					22	-	4,392,300,000			Dinkes Prov. NTT
a	Obat-obatan dan bahan medis habis pakai	paket				85	-	1,464,100,000	85	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
b	Makanan tambahan/pendamping untuk kelompok rentan (MP ASI, MP Ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi dan Anak [PMBA] dll.)	paket	-			85	-	1,131,350,000	85	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
c	Kelengkapan pendukung kesehatan perorangan (Hygiene Kit dan Family Kit)	paket	-			85	-	133,100,000	85	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
d	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	-			23	-	2,000,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
e	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			46	-	600,000,000	46	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
f	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			69	-	600,000,000	69	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
g	Tenaga kesehatan masyarakat terlatih yang memiliki kemampuan di bidang surveilans, gizi, epidemiologi, kesehatan lingkungan, kesehatan reproduksi, dan lain-lain	Orang	-			23	-	600,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
h	Tenaga kesehatan terlatih yang memiliki kemampuan dalam penanganan kesehatan jiwa	Orang	-			1	-	600,000,000	1	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
i	Apoteker dan/atau asisten apoteker	Orang	-			23	-	600,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT

j	Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	-			23	-	600,000,000	23	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi	orang	3042	3,042	3,042			20,560,111,471		APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
a	Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai dengan jenis penyakit	Unit	1350 0			13500		2,169,247,163			
b	Profilaksis/Vitamin/Obat/Vaksin	Unit	600			600		8,784,600,000			
c	Wadah pengiriman spesimen/Specimen Carrier	Unit	28			28		163,979			
d	Tempat sampah biologis	Unit	7			7		2,140,953			
e	Formulir penyelidikan epidemiologi, form/lembar KIE, alat tulis yang diperlukan	Set	154			154		10,506,967			
f	Alat dan bahan pengambilan spesimen (Tabung, Pot, Media Amies, Reagen dll) untuk spesimen yang berasal dari manusia	Unit	105			105		614,922			
g	Alat pemeriksaan fisik (Stetoskop, Termometer Badan, Tensimeter, Senter, Test Diagnosis Cepat, dll)	Unit	105			105		461,191,500			
	Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di luar fasilitas layanan kesehatan dilakukan oleh Tim Gerak Cepat (SK Dinas Provinsi) terdiri dari							3,084,016,721		APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
h	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	23			23		721,728,095			
i	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang epidemiologi	Orang	23			23		560,677,095			
j	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang kesehatan lingkungan	Orang	23			23		560,677,095			
k	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat yang mempunyai kemampuan di bidang entomologi	Orang	23			23		560,677,095			
l	Tenaga kesehatan: Tenaga Laboratorium	Orang	23			23		212,148,090			

m	Tenaga kesehatan: Tenaga penyuluh/promosi kesehatan	Orang	23			23		1,218,863,250			
n	Tenaga kesehatan : Petugas yang terlibat dalam pelaksanaan penyelidikan epidemiologi disesuaikan dengan jenis KLB yang terjadi	Orang	42			42		1,023,845,130			
<i>Pelayanan kesehatan pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi dilaksanakan di dalam fasilitas layanan kesehatan</i>											
o	Tenaga kesehatan : Dokter (umum dan spesialis)	Orang	436			436	436	444,720,000	-	APBD/APBN	Dinkes Prov. NTT
p	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	436			436	436	444,720,000	-		
q	Tenaga kesehatan : Petugas Radiologi	Orang	436			436	-	444,720,000	436		
r	Tenaga kesehatan : Tenaga Laboratorium	Orang	436			436	436	444,720,000	-		

Keterangan:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM

Kolom 3 : Diisi Satuan yang sudah ditentukan

Kolom 4 : Diisi Tahun Dasar (N)

Kolom 5 : Diisi dengan target penerima layanan dasar

Kolom 6 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya

Kolom 7 : Diisi target mutu layanan dasar

Kolom 8 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya

Kolom 9 : Diisi anggaran

Kolom 10: Diisi inisiasi

Kolom 11 : Diisi tentang sumber pendanaan

Kolom 12: Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM

Kolom 13: Diisi dengan target penerima layanan dasar

Kolom 14 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya

Kolom 15: Diisi target mutu layanan dasar

Kolom 16: Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya

Kolom 17 : Diisi anggaran

Kolom 18: Diisi inisiasi

Kolom 19 : Diisi tentang sumber pendanaan

Kolom 20: Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM

Kolom 21 : Diisi dengan target penerima layanan dasar

Kolom 22: Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya

Kolom 23 : Diisi target mutu layanan dasar

Kolom 24: Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 25: Diisi anggaran
Kolom 26: Diisi inisiasi
Kolom 27 : Diisi tentang sumber pendanaan
Kolom 28: Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM
Kolom 29: Diisi dengan target Penerima layanan dasar
Kolom 30 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 31 : Diisi target mutu layanan dasar
Kolom 32: Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 33 : Diisi anggaran
Kolom 34 : Diisi inisiasi
Kolom 35 : Diisi tentang sumber pendanaan
Kolom 36 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM
Kolom 37: Diisi dengan target Penerima layanan dasar
Kolom 38: Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 39: Diisi target mutu layanan dasar
Kolom 40 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 41 : Diisi anggaran
Kolom 42: Diisi inisiasi
Kolom 43 : Diisi tentang sumber pendanaan
Kolom 44 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM

Tabel 3.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi NTT 2023-2027

NO	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)			Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					Target	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	2023	4		Rp 800,000,000		APBD	PUPR
			Liter/Detik	2023	1		Rp 200,000,000		APBD	PUPR
			Liter/Detik	2023	1		Rp 4,200,000,000		APBD	PUPR
			SR	2023						
			Dokumen	2023						
			SR	2023						
			Kabupaten/Kota	2023						
			Kabupaten/Kota	2023						
			Unit	2023						
			Dokumen	2023						
			Ha	2023						
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Badan Usaha	2023						
			Dokumen	2023	3		Rp 1,850,000,000		APBD	PUPR
			Dokumen	2023						
			Rumah Tangga	2023						
			Rumah Tangga	2023						
			Dokumen	2023						
			Kelompok Masyarakat	2023						
			Orang	2023						
Dokumen	2023									
Unit	2023									

NO	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+3)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					Target	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	19	20	21	22	23	24
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	2023						
			Liter/Detik	2023	1		200,000,000		APBD	PUPR
			Liter/Detik	2023	2		5,300,000,000		APBD	PUPR
			SR	2023						
			Dokumen	2023						
			SR	2023						
			Kabupaten/Kota	2023						
			Kabupaten/Kota	2023						
			Unit	2023						
			Dokumen	2023						
			Ha	2023						
			Badan Usaha	2023						
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Dokumen	2023	1		150,000,000		APBD	PUPR
			Dokumen	2023						
			Rumah Tangga	2023						
			Rumah Tangga	2023						
			Dokumen	2023						
			Kelompok Masyarakat	2023						
			Orang	2023						
			Dokumen	2023						
			Unit	2023						

NO	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+4)			Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
					Target	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	5	6	25	26	27	28	29	30
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	2023						
			Liter/Detik	2023	1		200,000,000		APBD	PUPR
			Liter/Detik	2023	2		5,300,000,000		APBD	PUPR
			SR	2023						
			Dokumen	2023						
			SR	2023						
			Kabupaten/Kota	2023						
			Kabupaten/Kota	2023						
			Unit	2023						
			Dokumen	2023	1		400,000,000		APBD	PUPR
			Ha	2023	1		1,500,000,000		APBD	PUPR
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Dokumen	2023	1		150,000,000		APBD	PUPR
			Dokumen	2023						
			Rumah Tangga	2023						
			Rumah Tangga	2023						
			Dokumen	2023						
			Kelompok Masyarakat	2023						
			Orang	2023						
			Dokumen	2023						
			Unit	2023						

NO	Program	Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+5)			Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
					Target	Realisasi	Anggaran				
1	2	3	5	6	31	32	33	34	35	36	
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIRMINUM	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	2023							
			Liter/Detik	2023	1		1,000,000,000		APBD	PUPR	
			Liter/Detik	2023	1		50,000,000,000		APBN	PUPR	
			SR	2023							
			Dokumen	2023							
			SR	2023							
			Kabupaten/Kota	2023							
			Kabupaten/Kota	2023							
			Unit	2023							
			Dokumen	2023							
			Ha	2023							
			Badan Usaha	2023							
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Dokumen	2023	1		150,000,000		APBD	PUPR	
			Dokumen	2023							
			Rumah Tangga	2023							
			Rumah Tangga	2023							
			Dokumen	2023							
			Kelompok Masyarakat	2023							
			Orang	2023							
			Dokumen	2023							
			Unit	2023							

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM
- Kolom 3 : Diisi Satuan yang sudah ditentukan
- Kolom 4 : Diisi Tahun Dasar (N)
- Kolom 5 : Diisi dengan target penerima layanan dasar
- Kolom 6 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 7 : Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 8 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 9 : Diisi anggaran
- Kolom 10 : Diisi inisiasi
- Kolom 11 : Diisi tentang sumber pendanaan
- Kolom 12 : Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM
- Kolom 13 : Diisi dengan target penerima layanan dasar
- Kolom 14 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 15 : Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 16 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 17 : Diisi anggaran
- Kolom 18 : Diisi inisiasi
- Kolom 19 : Diisi tentang sumber pendanaan
- Kolom 20 : Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM
- Kolom 21 : Diisi dengan target penerima layanan dasar
- Kolom 22 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 23 : Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 24 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 25 : Diisi anggaran
- Kolom 26 : Diisi inisiasi
- Kolom 27 : Diisi tentang sumber pendanaan
- Kolom 28 : Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM
- Kolom 29 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar
- Kolom 30 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 31 : Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 32 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 33 : Diisi anggaran
- Kolom 34 : Diisi inisiasi
- Kolom 35 : Diisi tentang sumber pendanaan
- Kolom 36 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM
- Kolom 37 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar
- Kolom 38 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 39 : Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 40 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 41 : Diisi anggaran
- Kolom 42 : Diisi inisiasi
- Kolom 43 : Diisi tentang sumber pendanaan
- Kolom 44 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM

**Tabel 3.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi NTT
2023-2027**

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Provinsi										
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	2022								
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagikorban bencana	Rumah	2022								
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	2022								
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	2022								
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagikorban bencana.	Rumah	2022								
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang LayakHuni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		2022								
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas PenguasaanTanah dan/atau Bangunan	Rumah	2022								
b	Subsidi uang sewa	Rumah	2022								
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	2022			38	38	100,000,000		DAU	Dinas PUPR Provinsi NTT

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provinsi											
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	2022								
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	2022								
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	2022			100	100	6,000,000,000		DAU	Dinas PUPR Provinsi NTT
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	2022			100	100	13,500,000,000		DAU	Dinas PUPR Provinsi NTT
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	2022			50	50	6,750,000,000		DAU	Dinas PUPR Provinsi NTT
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		2022								
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	2022								
b	Subsidi uang sewa	Rumah	2022								
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	2022			38	38	5,130,000,000		DAU	Dinas PUPR Provinsi NTT

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Provinsi										
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang LayakHuni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	2022							
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	2022							
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	2022	100	100	100	100	6,000,000,000		DAU
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	2022	100	100	100	100	13,500,000,000		DAU
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagikorban bencana.	Rumah	2022	50	50	50	50	6,750,000,000		DAU
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		2022							
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanahdan/atau Bangunan	Rumah	2022							
b	Subsidi uang sewa	Rumah	2022							
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	2022	30	30	30	30	100,000,000		DAU

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Provinsi										
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Orang	2022								
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	2022								
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	2022	100	100	100	100	6,000,000,000		DAU	Dinas PUPR Provinsi NTT
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	2022	100	100	100	100	13,500,000,000		DAU	Dinas PUPR Provinsi NTT
d	Pembangunan baru di lokasi baru/ relokasi bagi korban bencana.	Rumah	2022	50	50	50	50	6,750,000,000		DAU	Dinas PUPR Provinsi NTT
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		2022								
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	2022								
b	Subsidi uang sewa	Rumah	2022								
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	2022	30	30	30	30	4,050,000,000		DAU	Dinas PUPR Provinsi NTT

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Setoran	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+5)					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
Provinsi:											
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi		2022								
a	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah	2022								
b	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah	2022	100	100	100	100	6,000,000,000		DAU	DinasPUPR Provinsi NTT
c	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah	2022	100	100	100	100	13,500,000,000		DAU	Dinas PUPR Provinsi NTT
d	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	Rumah	2022	50	50	50	50	6,750,000,000		DAU	DinasPUPR Provinsi NTT
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi		2022								
a	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	2022								
b	Subsidi uang sewa	Rumah	2022								
c	Penyediaan rumah layak huni	Rumah	2022	30	30	30	30	100,000,000		DAU	DinasPUPR Provinsi NTT

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM
- Kolom 3 : Diisi Satuan yang sudah ditentukan
- Kolom 4 : Diisi Tahun Dasar (N)
- Kolom 5 : Diisi dengan target penerima layanan dasar
- Kolom 6 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 7 : Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 8 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 9 : Diisi anggaran
- Kolom 10: Diisi inisiasi
- Kolom 11 : Diisi tentang sumber pendanaan
- Kolom 12: Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM Kolom 13: Diisi dengan target penerima layanan dasar
- Kolom 14: Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnyaKolom 15: Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 16: Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnyaKolom 17 : Diisi anggaran
- Kolom 18: Diisi inisiasi
- Kolom 19: Diisi tentang sumber pendanaan
- Kolom 20: Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM Kolom 21: Diisi dengan target penerima layanan dasar
- Kolom 22: Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnyaKolom 23 : Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 24 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnyaKolom 25 : Diisi anggaran
- Kolom 26: Diisi inisiasi
- Kolom 27 : Diisi tentang sumber pendanaan
- Kolom 28: Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM Kolom 29: Diisi dengan target Penerima layanan dasar
- Kolom 30 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnyaKolom 31 : Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 32: Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnyaKolom 33 : Diisi anggaran
- Kolom 34 : Diisi inisiasi
- Kolom 35: Diisi tentang sumber pendanaan
- Kolom 36 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM Kolom 37 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar
- Kolom 38: Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnyaKolom 39 : Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 40: Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnyaKolom 41 : Diisi anggaran
- Kolom 42: Diisi inisiasi
- Kolom 43 : Diisi tentang sumber pendanaanKolom 44 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM

Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Provinsi NTT 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1)/2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provinsi											
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	orang	2022	1000	1000						
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	2022			20	20	1,000,000,000	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) SatpolPP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	2022			6	6	20,000,000	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT
3	Standar peningkatan kapasitas anggota SatpolPP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	2022			16	16	100,000,000	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT

4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	2022			100%	-	300,000,000	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	2022			100%	-	150,000,000	-	-	Satpol PP Prov. NTT
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/ atau berat)	orang	2022			100%	-	75,000,000	-	-	Satpol PP Prov. NTT

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+2)/2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provinsi											
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	orang	2022		20	1	-	1,000,000,000	-		
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa: a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	2022		6	1	-	20,000,000.00	-		
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) SatpolPP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	2022	Masyarakat	120	1	-	120,000,000.00	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT
3	Standar peningkatan kapasitas anggota SatpolPP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	2022		300	1	-	300,000,000.00	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	2022	Mayarakat	150	1	-	150,000,000.00	-	-	Satpol PP Prov. NTT

5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	2022	Masyarakat	250	1	-	75,000,000.00	-	-	Satpol PP Prov. NTT
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	2022		20	1	-	1,000,000,000	-		

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar(N)	Pencapaian SPM (N+3)/2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provinsi											
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	orang	2022		20	1	-	500,000,000	-	-	Satpol PP Prov. NTT
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	2022		10	1	-	25,000,000	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) SatpolPP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	2022	Masyarakat	120	1	-	120,000,000	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT
3	Standar peningkatan kapasitas anggota SatpolPP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	2022		300	1	-	300,000,000	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	2022	Masyarakat	150	1	-	150,000,000	-	-	Satpol PP Prov. NTT

5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	2022	Masyarakat	250	1	-	75,000,000	-	-	Satpol PP Prov. NTT
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/ atau berat)	orang	2022		20	1	-	500,000,000	-	-	Satpol PP Prov. NTT

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+4)/2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provinsi											
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	orang	2022		10	100%	-	500,000,000	-		Satpol PP Prov. NTT
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	2022		10	100%	-	35,000,000	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) SatpolPP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	2022	Masyarakat	120	100%	-	120,000,000	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT
3	Standar peningkatan kapasitas anggota SatpolPP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	2022		300	100%	-	300,000,000	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	2022		250	100%	-	200,000,000	-		Satpol PP Prov. NTT

5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	2022	Masyarakat	300	100%	-	100,000,000	-		Satpol PP Prov. NTT
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/ atau berat)	orang	2022		10	100%	-	500,000,000	-		Satpol PP Prov. NTT

RO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+5)/2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Provinsi										
	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Provinsi	orang	2022		20	100%	-	250,000,000	-	-	Satpol PP Prov. NTT
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	unit	2022		5	100%	-	15,000,000	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) SatpolPP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	dokumen	2022	Mayarakat	100	100%	-	100,000,000	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT
3	Standar peningkatan kapasitas anggota SatpolPP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	orang	2022		300	100%	-	300,000,000	-	PAD	Satpol PP Prov. NTT
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	dokumen	2022	Mayarakat	300	100%	-	300,000,000	-	-	Satpol PP Prov. NTT

5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	orang	2022	Mayarakat	300	100%	-	100,000,000	-	-	Satpol PP Prov. NTT
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	orang	2022		20	100%	-	250,000,000	-	-	Satpol PP Prov. NTT

8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana		2022								
9	Penyusunan rencanakontijensi	Dokumen	2022	1 dokumen	100%			200,000,000	BPBD NTT dan Lembaga Mitra	Lembaga Mitra (Program SIAP SIAGA)	BPBD Provinsi NTT dan Lembaga Mitra
10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan	2022	2 laporan					BPBD NTT	APBD	BPBD NTT
11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	2022	1 dokumen	100%			100,000,000	BPBD NTT dan Lembaga Mitra	Lembaga Mitra (Program SIAP SIAGA)	BPBD Provinsi NTT dan Lembaga Mitra
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi										
1	Penyusunan kajian resiko bencana provinsi	Dokumen	2022	1 (satu)	100%			250,000,000	BPBD NTT dan Lembaga Mitra	Lembaga Mitra (Program SIAP SIAGA)	BPBD Provinsi NTT dan Lembaga Mitra
2	Sosialisasi , komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)rawan bencana provinsi (per jenis bencana)	Orang	2022	1625 org	80%			1,000,000,000	BPBD NTT	DAU Spesific Grant Bidang Pendidikan	BPBD Provins iNTT
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										
1	Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan	2022								

2	Respon cepat penanganan darurat bencana	Laporan	2022								
3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Laporan	2022								
4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	2022								
5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	2022								
6	Respon cepat bencana nonalam epidemi/wabah penyakit	Laporan	2022								

NO	Sub Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+2)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Dokumen	2022								
2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	2022	250 org	100%			350,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	2022	4 dokumen	100%			250,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	Unit	2022	3 unit	100%			150,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
5	Pengelolaan resiko bencana	Dokumen	2022	1 dokumen	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	2022	2 kawasan	100%			250,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT

1	Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan	2022	2 laporan	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
2	Respon cepat penanganandarurat bencana	Laporan	2022	2laporan	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
3	Pencarian, pertolongan danevakuasikorban bencana	Laporan	2022	2 laporan	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasikorban bencana	Orang	2022	100 org	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
5	Aktivasi sistim komandopenanganan darurat bencana	Laporan	2022	2laporan	100%			150,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
6	Respon cepat bencana nonalam epidemi/wabah penyakit	Laporan	2022	2 laporan	100%			150,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT

NO	Sub Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+3)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Dokumen	2022	1 dokumen	100%			250,000,000	BPBD dan Lembaga Mitra	APBD/Lembaga Mitra	BPBD Provinsi NTT
2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	2022	350 org	100%			450,000,000	BPBD NTT	APBD/Lembaga Mitra	BPBD Provinsi NTT
3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	2022	6 dokumen	100%			300,000,000	BPBD NTT/Lembaga Mitra	APBD/Lembaga Mitra	BPBD Provinsi NTT
4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	Unit	2022	4 unit	100%			200,000,000	BPBD NTT/Lembaga Mitra	APBD/Lembaga Mitra	BPBD Provinsi NTT
5	Pengelolaan resiko bencana	Dokumen	2022	2 dokumen	100%			150,000,000	BPBD NTT/Lembaga Mitra	APBD/Lembaga Mitra	BPBD Provinsi NTT
6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	2022	3 kawasan	100%			300,000,000	BPBD NTT/Lembaga Mitra	APBD/Lembaga Mitra	BPBD Provinsi NTT

1	Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan	2022	2 laporan	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
2	Respon cepat penanganandarurat bencana	Laporan	2022	2 laporan	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
3	Pencarian, pertolongan danevakuasikorban bencana	Laporan	2022	2 laporan	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasikorban bencana	Orang	2022	100 org	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
5	Aktivasi sistim komandopenanganan darurat bencana	Laporan	2022	2 laporan	100%			150,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
6	Respon cepat bencana nonalam epidemi/wabah penyakit	Laporan	2022	2 laporan	100%			150,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT

NO	Sub Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+4)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Dokumen	2022								
2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	2022	450	100%			550,000,000	BPBD NTT	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT
3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	2022	8 dokumen	100%			350,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT
4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	Unit	2022	5 unit	100%			250,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT
5	Pengelolaan resiko bencana	Dokumen	2022	3 dokumen	100%			200,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT
6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	2022	4 kawasan	100%			350,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT

7	Penanganan pasca bencanaProvinsi		2022	3 kawasan	100%			350,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT
---	----------------------------------	--	------	-----------	------	--	--	-------------	----------------------------	------------------------	----------

8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana		2022	200 org	100%			250,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT
9	Penyusunan rencanakontijensi	Dokumen	2022	4 dokumen	100%			1,250,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT
10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan	2022	2 laporan	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT
11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	2022								
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi										
1	Penyusunan kajian resiko bencana provinsi	Dokumen	2022								
2	Sosialisasi , komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana provinsi (per jenis bencana)	Orang	2022	2000 org	100%			900,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										
1	Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan	2022	2 laporan	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
2	Respon cepat penanganan darurat bencana	Laporan	2022	2 laporan	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT

3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Laporan	2022	2 laporan	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	2022	100 org	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	2022	2 laporan	100%			150,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
6	Respon cepat bencana nonalam epidemi/wabah penyakit	Laporan	2022	2 laporan	100%			150,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT

NO	Sub Kegiatan	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+5)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana										
1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana	Dokumen	2022	1 dokumen	100%			250,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Orang	2022	550	100%			650,000,000	BPBD NTT	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT
3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen	2022	10 dokumen	100%			400,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT
4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana	Unit	2022	6 unit	100%			300,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT
5	Pengelolaan resiko bencana	Dokumen	2022	4 dokumen	100%			250,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT
6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	2022	5 kawasan	100%			400,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT

7	Penanganan pasca bencanaProvinsi		2022	4 kawasan	100%			400,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/Lembaga Mitra	BPBD NTT
---	----------------------------------	--	------	-----------	------	--	--	-------------	----------------------------	--------------------	----------

8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana		2022	250 org	100%			300,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT
9	Penyusunan rencan kontijensi	Dokumen	2022	5 dokumen	100%			1,300,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD/ Lembaga Mitra	BPBD NTT
10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Laporan	2022	2 laporan	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	2022								
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi										
1	Penyusunan kajian resiko bencana provinsi	Dokumen	2022								
2	Sosialisasi , komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana provinsi (per jenis bencana)	Orang	2022	2500 org	100%			950,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana										
1	Respon cepat kejadian luarbiasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan	2022	2 laporan	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT

2	Respon cepat penanganan darurat bencana	Laporan	2022	2 laporan	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Laporan	2022	2 laporan	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	2022	100 org	100%			100,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	2022	2 laporan	100%			150,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT
6	Respon cepat bencana nonalam epidemi/wabah penyakit	Laporan	2022	2 laporan	100%			150,000,000	BPBD NTT/ Lembaga Mitra	APBD dan Lembaga Mitra	BPBD NTT

Keterangan:

- Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut
- Kolom 2 : Diisi Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM
- Kolom 3 : Diisi Satuan yang sudah ditentukan
- Kolom 4 : Diisi Tahun Dasar (N)
- Kolom 5 : Diisi dengan target penerima layanan dasar
- Kolom 6 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 7 : Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 8 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 9 : Diisi anggaran
- Kolom 10: Diisi inisiasi
- Kolom 11 : Diisi tentang sumber pendanaan
- Kolom 12 : Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM
- Kolom 13: Diisi dengan target penerima layanan dasar
- Kolom 14: Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 15 : Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 16 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 17 : Diisi anggaran
- Kolom 18: Diisi inisiasi
- Kolom 19 : Diisi tentang sumber pendanaan
- Kolom 20: Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM
- Kolom 21 : Diisi dengan target penerima layanan dasar
- Kolom 22: Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 23 : Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 24 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 25: Diisi anggaran
- Kolom 26 : Diisi inisiasi
- Kolom 27 : Diisi tentang sumber pendanaan
- Kolom 28 : Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM
- Kolom 29 : Diisi dengan target Penerima layanan dasar
- Kolom 30 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 31 : Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 32 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 33 : Diisi anggaran
- Kolom 34 : Diisi inisiasi
- Kolom 35 : Diisi tentang sumber pendanaan
- Kolom 36 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM
- Kolom 37: Diisi dengan target Penerima layanan dasar
- Kolom 38: Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 39 : Diisi target mutu layanan dasar
- Kolom 40 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
- Kolom 41 : Diisi anggaran
- Kolom 42: Diisi inisiasi
- Kolom 43 : Diisi tentang sumber pendanaanKolom 44 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM

Tabel 3.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial Provinsi NTT 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+1) 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provinsi											
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalamPanti										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	50	50	50	100	574,867,700	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	50	50	50	100	223,499,700	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	10	10	10	100	-	-	APBD+ APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan alat bantu	Orang	2022	50	50	50	100	300,782,980	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	50	50	50	100	71,538,350	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	50	50	50	100	277,999,500	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	50	50	50	100	-	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	2022	3	3	3	100	-	-	-	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	11	11	11	100	59,956,600	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
j	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	7	7	7	100	49,986,400	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti										
a	Pengasuhan	Orang	2022	270	270	270	100	189,566,500	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan makanan	Orang	2022	270	270	270	100	3,021,084,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan sandang	Orang	2022	270	270	270	100	409,760,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	14	14	14	100	-	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	270	270	270	100	39,950,720	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	270	270	270	100	380,890,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	270	270	270	100	269,239,800	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	2022	1	1	1	100	-	-	-	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2022	270	270	270	100	471,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	50	50	50	100	41,142,900	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	20	20	20	100	53,387,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
l	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	135	135	135	100	1,592,013,400	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	135	135	135	100	127,201,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	19	19	19	100	-	-	APBD dan APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan alat bantu	Orang	2022	135	135	135	100	-	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	2022	135	135	135	100	104,500,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	135	135	135	100	89,987,900	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	135	135	135	100	-	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi LanjutUsia	Orang	2022	1	1	1	100	-	-	-	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	2022	135	135	135	100	511,012,720	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	19	19	19	100	135,115,400	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	10	10	10	100	25,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
l	Pemulasaraan	Orang	2022	10	10	10	100	48,735,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan PengemisTerlantar di dalam Panti										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Pemulangan ke daerah asal	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-

5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi										
a	Penyediaan permakanaan	Orang	2022	100	100	100	100	25,080,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	100	100	100	100	-	-	-	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	2022	4	4	4	100	1,684,928,800	-	DID+ APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	2022	5	5	5	100	-	-	-	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Pelayanan dukungan psikososial	Orang	2022	50	50	50	100	-	-	-	Dinas Sosial Prov. NTT

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+2) 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provinsi											
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	50	50	50	100	575,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	50	50	50	100	230,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	10	10	10	100	200,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan alat bantu	Orang	2022	50	50	50	100	305,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	50	50	50	100	75,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	50	50	50	100	280,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	50	50	50	100	180,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	2022	5	5	5	100	5,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

i	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	10	10	10	100	70,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
j	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	10	10	10	100	120,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Pant										
a	Pengasuhan	Orang	2022	270	270	270	100	190,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan makanan	Orang	2022	270	270	270	100	3,030,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan sandang	Orang	2022	270	270	270	100	420,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	14	14	14	100	300,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	270	270	270	100	40,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	270	270	270	100	390,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	270	270	270	100	270,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor IndukKependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	2022	10	10	10	100	5,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2022	270	270	270	100	475,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	20	20	20	100	50,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	20	20	20	100	160,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
l	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	2022	1	1	1	100	10,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	135	135	135	100	1,560,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

B	Penyediaan sandang	Orang	2022	135	135	135	100	150,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	19	19	19	100	200,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan alat bantu	Orang	2022	135	135	135	100	50,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	2022	135	135	135	100	110,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	135	135	135	100	90,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	135	135	135	100	50,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi LanjutUsia	Orang	2022	5	5	5	100	1,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	2022	135	135	135	100	60,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	20	20	20	100	200,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	10	10	10	100	150,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
l	Pemulasaraan	Orang	2022	10	10	10	100	80,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan PengemisTerlantar di dalam Panti										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
d	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
e	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
f	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
g	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-
i	Pemulangan ke daerah asal	Orang	2022	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+3) 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provinsi											
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	50	50	50	100	580,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	50	50	50	100	235,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	10	10	10	100	300,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan alat bantu	Orang	2022	50	50	50	100	310,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	50	50	50	100	80,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	50	50	50	100	285,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	50	50	50	100	185,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	2022	5	5	5	100	7,500,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

I	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	10	10	10	100	75,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
j	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	10	10	10	100	125,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti										
a	Pengasuhan	Orang	2022	270	270	270	100	195,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan makanan	Orang	2022	270	270	270	100	3,035,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan sandang	Orang	2022	270	270	270	100	425,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	14	14	14	100	450,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	270	270	270	100	45,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	270	270	270	100	395,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	270	270	270	100	275,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	2022	10	10	10	100	5,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2022	270	270	270	100	480,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	20	20	20	100	55,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	20	20	20	100	165,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
l	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	2022	1	1	1	100	15,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	135	135	135	100	1,565,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	135	135	135	100	155,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	19	19	19	100	200,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan alat bantu	Orang	2022	135	135	135	100	55,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	2022	135	135	135	100	115,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	135	135	135	100	95,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	135	135	135	100	55,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi LanjutUsia	Orang	2022	5	5	5	100	1,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	2022	135	135	135	100	65,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	20	20	20	100	200,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	10	10	10	100	155,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
l	Pemulasaraan	Orang	2022	10	10	10	100	85,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	25	25	25	100	273,750,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	25	25	25	100	100,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	25	25	25	100	150,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	25	25	25	100	40,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang	2022	25	25	25	100	150,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	25	25	25	100	25,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	2022	25	25	25	100	90,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2022	25	25	25	100	50,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Pemulangan ke daerah asal	Orang	2022	25	25	25	100	100,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi										
a	Penyediaan permakanaan	Orang	2022	100	100	100	100	50,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	100	100	100	100	30,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	2022	3	3	3	100	15,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	2022	7	7	7	100	15,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Pelayanan dukungan psikososial	Orang	2022	50	50	50	100	25,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+4) 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provinsi											
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti										
a	Penyediaan permakanaan	Orang	2022	50	50	50	100	585,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	50	50	50	100	240,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	10	10	10	100	300,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan alat bantu	Orang	2022	50	50	50	100	315,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	50	50	50	100	85,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	15	15	15	100	290,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	50	50	50	100	190,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	2022	5	5	5	100	7,500,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	10	10	10	100	80,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
j	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	10	10	10	100	130,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti										
a	Pengasuhan	Orang	2022	270	270	270	100	100,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan makanan	Orang	2022	270	270	270	100	3,040,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan sandang	Orang	2022	270	270	270	100	430,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	14	14	14	100	450,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	270	270	270	100	50,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	270	270	270	100	400,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	270	270	270	100	280,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor IndukKependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	2022	10	10	10	100	7,500,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2022	270	270	270	100	485,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	20	20	20	100	60,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	20	20	20	100	170,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
l	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	2022	1	1	1	100	20,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	135	135	135	100	1,570,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

b	Penyediaan sandang	Orang	2022	135	135	135	100	160,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	19	19	19	100	300,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT

d	Penyediaan alat bantu	Orang	2022	135	135	135	100	60,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	2022	135	135	135	100	120,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	135	135	135	100	100,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	135	135	135	100	60,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi LanjutUsia	Orang	2022	5	5	5	100	1,500,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	2022	135	135	135	100	70,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	20	20	20	100	300,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	10	10	10	100	160,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
l	Pemulasaraan	Orang	2022	10	10	10	100	90,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	25	25	25	100	280,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	25	25	25	100	105,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	25	25	25	100	150,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	25	25	25	100	45,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang	2022	25	25	25	100	150,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

f	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	25	25	25	100	30,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	2022	25	25	25	100	95,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

h	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2022	25	25	25	100	55,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Pemulangan ke daerah asal	Orang	2022	25	25	25	100	100,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	100	100	100	100	60,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	100	100	100	100	40,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	2022	3	3	3	100	20,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	2022	8	8	8	100	20,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Pelayanan dukungan psikososial	Orang	2022	50	50	50	100	25,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (N)	Pencapaian SPM (N+5) 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Provinsi											
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	50	50	50	100	590,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	50	50	50	100	245,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	10	10	10	100	300,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan alat bantu	Orang	2022	50	50	50	100	320,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	50	50	50	100	90,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	15	15	15	100	295,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	50	50	50	100	195,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi penyandang disabilitas	Orang	2022	5	5	5	100	7,500,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	10	10	10	100	85,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

j	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	202 2	10	10	10	100	135,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
---	------------------------------------------	-------	----------	----	----	----	-----	-------------	---	------	---------------------------------

2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti										
a	Pengasuhan	Orang	2022	270	270	270	100	105,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan makanan	Orang	2022	270	270	270	100	3,045,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan sandang	Orang	2022	270	270	270	100	435,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	14	14	14	100	450,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	270	270	270	100	55,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	270	270	270	100	405,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	270	270	270	100	285,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak	Orang	2022	10	10	10	100	7,500,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2022	270	270	270	100	490,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	20	20	20	100	65,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	20	20	20	100	175,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
l	Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Orang	2022	1	1	1	100	25,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	135	135	135	100	1,575,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	135	135	135	100	165,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	19	19	19	100	300,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan alat bantu	Orang	2022	135	135	135	100	65,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti sosial	Orang	2022	135	135	135	100	125,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

f	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	2022	135	135	135	100	110,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	135	135	135	100	65,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
h	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi LanjutUsia	Orang	2022	5	5	5	100	1,500,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Akses ke layanan kesehatan dasar	Orang	2022	135	135	135	100	75,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
j	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	2022	20	20	20	100	300,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
k	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	2022	10	10	10	100	165,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
l	Pemulasaraan	Orang	2022	10	10	10	100	95,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti										
a	Penyediaan permakanaan	Orang	2022	25	25	25	100	285,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	25	25	25	100	110,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan asrama yang mudah diakses	Unit	2022	25	25	25	100	150,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam panti	Orang	2022	25	25	25	100	50,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Pemberian bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	Orang	2022	25	25	25	100	150,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
f	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Orang	2022	25	25	25	100	35,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
g	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	Orang	2022	25	25	25	100	100,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

h	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2022	25	25	25	100	60,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
i	Pemulangan ke daerah asal	Orang	2022	25	25	25	100	100,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi										
a	Penyediaan permakanan	Orang	2022	100	100	100	100	70,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
b	Penyediaan sandang	Orang	2022	100	100	100	100	50,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
c	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	2022	3	3	3	100	25,000,000	-	APBD + APBN	Dinas Sosial Prov. NTT
d	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	2022	9	9	9	100	25,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT
e	Pelayanan dukungan psikososial	Orang	2022	50	50	50	100	30,000,000	-	APBD	Dinas Sosial Prov. NTT

Keterangan:

Kolom 1 : Diisi dengan nomor urut

Kolom 2 : Diisi Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM

Kolom 3 : Diisi Satuan yang sudah ditentukan

Kolom 4 : Diisi Tahun Dasar (N)

Kolom 5 : Diisi dengan target penerima layanan dasar

Kolom 6 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya

Kolom 7 : Diisi target mutu layanan dasar

Kolom 8 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya

Kolom 9 : Diisi anggaran

Kolom 10 : Diisi inisiasi

Kolom 11 : Diisi tentang sumber pendanaan

Kolom 12 : Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM

Kolom 13 : Diisi dengan target penerima layanan dasar

Kolom 14 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya

Kolom 15 : Diisi target mutu layanan dasar

Kolom 16 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya

Kolom 17 : Diisi anggaran

Kolom 18 : Diisi inisiasi

Kolom 19 : Diisi tentang sumber pendanaan

Kolom 20 : Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM

Kolom 21 : Diisi dengan target penerima layanan dasar

Kolom 22 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya

Kolom 23 : Diisi target mutu layanan dasar

Kolom 24 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya

Kolom 25 : Diisi anggaran

Kolom 26 : Diisi inisiasi

Kolom 27 : Diisi tentang sumber pendanaan

Kolom 28 : Diisi tentang instansi pelaksanaan penerapan SPM

Kolom 29: Diisi dengan target Penerima layanan dasar
Kolom 30 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 31 : Diisi target mutu layanan dasar
Kolom 32: Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 33 : Diisi anggaran
Kolom 34 : Diisi inisiasi
Kolom 35 : Diisi tentang sumber pendanaan
Kolom 36: Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM
Kolom 37: Diisi dengan target Penerima layanan dasar
Kolom 38 : Diisi realisasi pencapaian penerima layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 39 : Diisi target mutu layanan dasar
Kolom 40 : Diisi realisasi pencapaian mutu layanan dasar tiap tahunnya
Kolom 41 : Diisi anggaran
Kolom 42: Diisi inisiasi
Kolom 43 : Diisi tentang sumber pendanaan
Kolom 44 : Diisi tentang Instansi Pelaksana Penerapan SPM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam

menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
 - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan sumber daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian perkembangan hasil**, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku kegiatan**, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu:

- a. *Ketaatan/ compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. *Pemeriksaan/ auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. *Laporan/ accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahansosial dan masyarakat

sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.

- d. Penjelasan/ *explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Provinsi NTT, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?

4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
 - a. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - b. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - c. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - d. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
 1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 3. Jika ada kerja sama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

- c. **Manajemen Kerja**, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. **Pendanaan**. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
1. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
 2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
 3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? dan mengapa?

5. Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
6. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
7. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Provinsi NTT masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Renaksi Penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

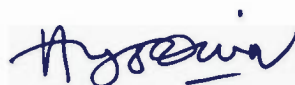
5.2. Saran

1. Perlu penguatan Tim Penerapan SPM Provinsi NTT berkaitan dengan pelaksanaan tahapan penerapan mulai dari terutama pada tahapan pengumpulan data dan perhitungan kebutuhan;
2. Perlu penguatan Tim Penerapan SPM Provinsi NTT berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim Penerapan SPM Provinsi NTT agar mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Biro pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada Tim Penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerja Sama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Renaksi Penerapan SPM Daerah Tahun 2023-2027 ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Provinsi NTT.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Biro Pemerintahan	f
Analisis Kebijakan Ahli Muda	f
Analisis Kebijakan Ahli Muda	f

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	Re
Plt. Kepala Biro Hukum	b